



Pemda Gagal Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK Kalbar Minta Komitmen Kepala Daerah

PONTIANAK, SP- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) "Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel" bertempat di Aula Kantor BPK, Pontianak, Senin (12/11).

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Joko Agus Setyono mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada entitas, tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperoleh komitmen dari kepala daerah untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan mendiskusikan kendala yang dihadapi entitas dalam

menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta menyetujui alternatif solusinya.

"Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan penyegaran pemahaman kepada pejabat

terkait di pemerintah daerah, tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian keuangan neg-

• **Baca Halaman 15**



Joko Agus Setyono
Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar

Beberapa kelemahan dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah antara lain, proporsi belanja terbesar adalah belanja pegawai dan belanja lain-lain.





Hal 9 ■ **bpk kalbar**

ara atau daerah,” kata Joko.

Joko menekankan, pentingnya dan “bagaimana proses, tujuan serta sasaran reformasi birokrasi tahun 2015-2019, dan kondisi yang diharapkan dalam kaitannya dengan tata kelola keuangan daerah.

Ia juga menegaskan, dokumen dan data-data yang harus diserahkan oleh Pemda kepada BPK dalam rangka mendukung proses pemeriksaan serta pembinaan yang dilakukan oleh BPK, sehingga berbagai potensi penyimpangan dapat segera diingatkan sebelum terjadi lebih lanjut.

“Beberapa kelemahan dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah antara lain, proporsi belanja terbesar adalah belanja pegawai dan belanja lain-lain,” ujar dia.

Sementara itu, belanja untuk kepentingan pelayanan publik masih rendah. Desentralisasi fiscal masih rendah. Tapi ketergantungan Pemda, khususnya kabupaten terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Sedangkan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Walaupun capaian persentase TLRHP di wilayah Kalbar, di atas rata-rata persentase TLRHP Nasional, tapi untuk capaian TLRHP yang berkaitan dengan pengukuran indikator kinerja utama perwakilan, dihitung dari kegiatan TLRHP selama lima tahun terakhir, tercatat masih rendah capaiannya, walaupun dari target

itu tercapai.

Namun, capaiannya tidak terlalu tinggi ini, berdampak terhadap rencana pencapaian persentase TLRHP dalam Rencana Strategis (Rastra) Perwakilan periode 2016-2020.

“Hal ini mengakibatkan dalam perjanjian kerja terkait IKU penyelesaian TLRHP, BPK Perwakilan Kalbar tidak dapat meyelaraskan dengan target dalam rastra,” imbuhnya.

Adapaun target penyelesaian TRLHP dalam Rastra untuk tahun 2018 sebesar 70 persen, hanya dapat dicantumkan dalam perjanjian kerja sebesar 65 persen, karena capaian tahun 2017 hanya lebih sedikit dari target realisasi perjanjian kerja BPK Perwakilan Kalbar. Target IKU penyelesaian TRLHP Tahun 2017 sebesar 65 persen dan terealisasi 65, 59 persen.

“Berbagai upaya telah dilakukan dengan adanya pernyataan komitmen antara kepala daerah dengan inspektur, untuk peningkatan penyelesaian sampai dengan semester II Tahun 2017,” terangnya.

Demikian pula, pada persentase dalam komitmen tersebut, sebagian besar tidak tercapai. Karena, kali ini kembali dibuat pernyataan komitmen kepala daerah yang diketahui oleh BPK Perwakilan Kalbar,” tandasnya.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono dalam paparannya pada kesempatan tersebut, lebih menekankan

pada peran kepolisian dalam pencegahan tindak pidana korupsi, untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Ia menyebut, mereka yang bisa dikenakan sebagai pelaku korupsi adalah para penyelenggara atau pejabat negara yang menjalankan fungsi, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan pejabat-pejabat lainnya yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-Undang.

“Inilah yang kita antisipasi, dan perlu kita lakukan sosialisasi, jangan sampai hal-hal merugikan terjadi menimpa diri kita, dan keluarga, lantaran amanah kita sebagai pejabat penyelenggara negara,” kata Didi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, sesuai data pada tahun 2017 terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat, terdapat 24 kasus Tipikor, di mana 8 di antaranya ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, sisanya ditangani oleh masing-masing Polres jajaran.

Kemudian pada Tahun 2018 sampai akhir Oktober tercatat ada 28 kasus, di mana 12, di antaranya adalah yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, sisanya juga tersebar di masing-masing Polres jajaran.

“Tahun 2017 yang nihil dari kasus korupsi hanya Landak dan Kapuas Hulu. Sementara pada tahun 2018 sampai akhir Oktober, tercatat Singkawang, Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu

dan Kayong Utara tidak ada kasus. Namun, ini bukan berarti tidak ada, mungkin terlewatkan dan sebagainya,” ungkapnya.

“Karena, bagaimanapun juga ada langkah-langkah dalam menanganinya, baik secara operasional maupun secara laporan, baru bisa ditindaklanjuti,” tambah Kapolda.

Meski secara angka, ada peningkatan kasus pada tahun 2018, dibandingkan tahun 2017. Namun dari sisi kualitatif angka rupiahnya, turun dibandingkan tahun 2017. Di mana pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp6,841 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp4,023 miliar.

Dari data, kata Didi tercatat pada tahun 2017 terdapat satu Tipikor Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat jadi empat kasus dengan masing-masing di Kota Pontianak, Landak, Sekadau, dan Melawi.

“Nanti bupati/walikota tolong berikan pemahaman kepada para kades atau lurah ini, karena lurah nanti pada tahun 2019 akan mendapatkan kucuran dana. Ini penting, agar tidak lagi ada penyimpangan yang mengarah pada kasus-kasus korupsi,” ingatnya.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh masing-masing 14 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Kalbar, Inspektur, Kepala Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta beberapa staf Inpektorat dan BPKAD. **(nak/bob)**